

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENJUALAN VIDEO PORNO (Studi Putusan No. 63/Pid/B/2009/PN.TK)

Oleh

NATA PARENDA

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong perkembangan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih modern, karena penggunaan teknologi selalu mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Suatu teknologi pada dasarnya diciptakan untuk peningkatan kualitas hidup dan mempermudah aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Teknologi informasi telah banyak dimanfaatkan oleh para konsumen sebagai sarana untuk memperlancar penyampaian informasi, bisnis, dan tidak jarang teknologi tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan yang melanggar hukum yang ada, terutama yang berkaitan dengan pornoaksi dan pornografi. Pelanggaran hukum di bidang pornografi dan pornoaksi diantaranya ditandai dengan kian maraknya peredaran video porno yang penyebarannya tak hanya melalui keping-keping VCD (*video compact disc*), tetapi kini telah mengalami perkembangan yang semakin canggih, hanya dengan *Bluetooth* atau *download* langsung dari internet, sudah bisa mendapatkan video yang diinginkan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dan mengadakan penelitian mengenai “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Video Porno”. Permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Penjualan Video Porno dan Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Video Porno.

Pendekatan masalah dilakukan berdasarkan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, jenis data berupa data primer data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

NATA PARENDA

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penjualan video porno yaitu Jamal Saputra bin Muslih mengakui perbuatan yang dilakukannya, menjual video porno karena desakan ekonomi dan ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam hal ini, terdakwa melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 282 ayat (3) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya dan melanggar kesusilaan dengan pidana selama 5 bulan penjara serta, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana penjualan video porno dalam perkara Nomor 63/Pid/B/2009/PN.TK adalah, terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum, terdakwa sopan dipersidangan, sedangkan keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat serta dapat merusak moral generasi muda. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana cenderung memperhatikan pada faktor pertimbangan yang bersifat dogmatis, sedangkan pada faktor yang berupa non yuridis kurang diperhatikan dalam pertimbangan hukum sehingga hakim dalam memutus perkara hanya bersifat dogmatis dan hanya memenuhi kepastian hukum, yaitu hanya menerapkan aturan hukum terhadap suatu peristiwa.

Saran dalam penelitian ini adalah bagi hakim, hendaknya dalam menjatuhkan putusan khususnya dalam kasus penjualan video porno selain mempertimbangkan pertimbangan yuridis yang terungkap di persidangan dengan memperhatikan unsur-unsur dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut umum juga harus mempertimbangkan pertimbangan non yuridis yang dilakukan oleh pelaku penjualan video porno terhadap masyarakat sekitar, selain itu juga dalam membuat pertimbangan, hakim seharusnya memperhatikan tuntutan atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum agar tidak terjadi kesalahan penerapan hukum.